

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.
- , 2015, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perpektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- J. Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Saydam, Gauzali, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta.
- Siagian, S.P, 2003, *Filosafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujatmo, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Thoha, Miftah, 2004, *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, Bala Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/ Tesis

Apita Maya, Evi, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris” , *Jurnal IUS*, Vol V, Nomor 2, (Agustus 2017): 261. <http://jurnalius.ac.id>, diakses tanggal 13 Juli 2019.

Mardiyah, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, 2017.

Muhammad Kurniawan Utomo, Laode, “Kewenangan Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Di Sulawesi Tenggara”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Puspita, Ayu, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pembinaan Terhadap Notaris Yang Dijatuhi Pidana Penjara”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Qadhafi, Moammar, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Notaris yang Berstatus Sebagai Narapidana di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128).

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/PID.B/2015/PN Yyk.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 973 K/Pid/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid/2016/PT.Yyk yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.B/2015/PN.Smn.